**BAB III**

**OBYEK DAN METODE PENELITIAN**

1. **Obyek Penelitian**

Obyek penelitian yang peneliti lakukan, yaitu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membantu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang pemilihan umum.

1. **Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara Pemilihan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Terdapat 27 (dua puluh Tujuh) satuan kerja (KPU Kabupaten/Kota) yang berada dibawah koordinasinya untuk mengelola kegiatan dalam rangka mendukung kinerja KPU. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Jawa Barat sebagai bagian hierarkis dari KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat di pertanggung jawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

1. **Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat**

Adapun visi dan misi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

**Visi :**

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

**Misi :**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksessibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan **code of conduct** penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggara Pemilu.
7. **Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat**

Tugas dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yaitu menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
8. **Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat**

Sumber : KPU, 2017

**Gambar 3.1**

**Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat**

Struktur organisasi di tingkat KPU Provinsi berdasarkan pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU Provinsi beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi, dibentuk Sekretariat KPU Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, dibantu 3 (tiga) orang Kepala Bagian, dan 6 (enam) orang Kepala Sub Bagian.

1. Ketua Komisioner, yang membawahi :
2. Anggota Komisioner
3. Sekretariat, yang membawahi :
4. Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas, membawahi :
5. Sub Bagian Teknis dan Hupmas
6. Sub Bagian Hukum
7. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, membawahi :
8. Sub Bagian Keuangan
9. Sub Bagian Umum dan Logistik
10. Bagian Program, Data, SDM, Organisasi, dan Kepegawaian, membawahi :
11. Sub Bagian Program dan Data
12. Sub Bagian SDM, Organisasi, dan Kepegawaian
13. **Keadaan Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat**

Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai sub sistem. Dalam hal ini sistem adalah seperangkat komponen yang bekerja bersama-sama dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai sub sistem tersebut terkait erat dengan sub sistem tidak berfungsi akan mempengaruh sistem secara keseluruhan. Semakin baik kita merangkai sebuah sistem kerja dengan hal-hal yang harus dilakukan, semakin besar kemungkinan orang memahami bahwa hal ini mempunyai manfaat yang penting. Kalau satu atau dua bagian yang kita lakukan, maka sistemnya tidak akan berjalan dengan lancar.

Keadaan pegawai pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting bagi organisasi karena merupakan sumber daya yang paling penting keadaannya dan juga sebagai pelaksana kerja yang baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk pemikiran. Hal itu merupakan faktor pendukung dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Mengingat hal itu, peneliti akan menggambarkan keadaan pegawai di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3. 1**

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pegawai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jabatan** | **Jumlah (Orang)** |
| 1. | Ketua Komisioner | 1 |
| 2. | Anggota Komisioner | 6 |
| 3. | Sekretariat | 1 |
| 4. | Kepala Bagian | 3 |
| 5. | Kepala Sub bagian | 6 |
| 6. | Fungsional Umum | 36 |
| **Jumlah** | **53** |

Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat 2016

**Tabel 3. 2**

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah (Orang)** |
| 1. | S2 | 10 |
| 2. | S1 | 20 |
| 3. | D3 | 8 |
| 4. | SLTA | 13 |
| 5. | SLTP | - |
| 6. | SD | 2 |
| **Jumlah** | **53** |

Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat 2016

* + 1. **Gambaran Umum Pengawasan dan Kinerja Pegawai di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat**

**1. Gambaran Umum Variabel Pengawasan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dapat dikemukakan gambaran umum tentang pengawasan terdapat karakteristik dari pengawasan yaitu:

1. Penetapan Standar Pelaksanaan

Penetapan standar pelaksanaan sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil kerja pegawai. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pegawai kurang mendapatkan pengarahan dari pimpinan mengenai prosedur kerja dan target yang harus dicapai, sehingga adanya keterlambatan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya, hal tersebut berdampak pada kinerja pegawai tidak akan optimal.

1. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu mengukur pelaksanaan kegiatan nyata dan menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Pimpinan tidak selalu mengukur setiap kegiatan secara langsung yang dilakukan pegawai karena ada kegiatan diluar kantor. Sehingga hanya mengukur kegiatan tersebut dari laporan-laporan hasil kegiatan dari pegawainya.

1. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran dan *system monitoring* ditentukan, pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang. Dari hasil penelitian terlihat kurangnya monitoring yang dilakukan pimpinan kepada pegawainya. Akibatnya masih ada pegawai yang melakukan tindakan tidak disiplin seperti tidak ada diruangan saat jam kerja.

1. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan penganalisaan penyimpangan

Pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat membandingkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawainya melalui laporan-laporan yang telah dibuat oleh pegawainya. Sehingga dapat menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

1. Pengambilan Korektif Apabila diperlukan

Pengambilan tindakan korektif diperlukan bila hasil analisis menunjukan perlunya tindakan korektif, tindakan ini harus diambil. Tindakan korektif dapat diambil dalam berbagai bentuk. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat kurangnya pengambilan tindakan korektif yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan teguran dan pengarahan langsung terhadap kesalahan dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan penyimpangan dikarenakan pimpinan tidak memiliki ketegasan.

1. **Gambaran Umum Variabel Kinerja Pegawai**
2. Kualitas

Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menunjukan bahwa dilihat dari kinerja pegawai di Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat yang belum maksimal sesuai dengan tupoksi di Sub Bagian Program, Data dan Informasi, yaitu melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data. Hal itu dikarenakan kecermatan dan ketelitian pegawai dalam penyimpanan data maupun dokumen penting masih tidak tersimpan dengan benar yang apabila pada suatu waktu dokumen itu diperlukan maka tidak dapat ditemukan dengan cepat, penyimpanan yang belum tertata ini disebabkan oleh kelalaian pegawai.

1. Kuantitas

Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Bahwa pegawai yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat ini memiliki cukup banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, namun hasil pekerjaannya masih belum optimal.

1. Waktu Kerja

Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Bahwa waktu kerja pegawai yang dapat dilihat dari absensi pegawai, masih adanya yang jarang mengisi absensi dan adanya pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan. Hal tersebut menunjukan bahwa masih rendahnya kedisiplinan dalam waktu kerja pegawai sehingga akan berdampak terhadap kinerja pegawai rendah.

1. Kerjasama

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, peneliti melihat bahwa adanya kerjasama yang cukup baik antar sesama pegawai dan atasan sehingga sudah terjalin komunikasi yang mampu membuat pegawai senang dan merasa nyaman dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang dibebankannya.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan analisis pada data yang telah didapatkan tersebut. Kegiatan pengumpulan dan analisis data tersebut untuk menggali penyelesaian sebuah masalah yang muncul. Rencana perlu dibuat agar pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga penelitian tersebut juga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi peneliti. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisa kuantitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi pada objek, ketika penelitian sedang dilaksanakan.

1. **Operasional Variabel Penelitian**

Operasionalisasi variabel adalah penarikan batasan yang lebih substantif dari suatu konsep atau merupakan suatu proses penentuan ukuran suatu variabel.

**Tabel 3. 3**

**Operasionalisasi Variabel Bebas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VARIABEL BEBAS** | **KOMPONEN**  | **INDIKATOR** | **ITEM** |
| Pengawasan ( X ) | 1. Penetapan standar pelaksanaan
 | 1. Prosedur kerja ditentukan dengan jelas
2. Penjelasan target yang dicapai
 | 12 |
| 1. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
 | a. Pimpinan menentukan kegiatan pegawaib. Pimpinan melakukanpengawasan | 34 |
| 1. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
 | a. Laporan lisan secara teraturb. Laporan tulisan secaraterjadwal | 56 |
| 1. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan

penyimpangan | a. Pimpinan mempelajari laporanb. Pimpinan melakukan perbandingan hasil | 78 |
| 1. Pengambilan tindakan korektif
 | a. Pimpinan memberikan pengarahanb. Pimpinan memberikan sanksi | 910 |

 Sumber : Handoko (2014 :361)

**Tabel 3. 4**

**Operasionalisasi Variabel Terikat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VARIABEL TERIKAT** | **KOMPONEN** | **INDIKATOR** | **ITEM** |
| Kinerja( Y ) | 1. Kualitas
 | a. Ketelitianb. waktu dan ketepatan tugas | 1112 |
| b. Kuantitas | a.Banyaknya pekerjaanb. Hasil pekerjaan | 1314 |
| c. Waktu kerja | a. Kehadiran b. Disiplin kerja | 1516 |
| d. Kerjasama | a. Kerjasama yang baik | 17 |

 Sumber : Sutrisno (2011 : 172-173)

1. **Populasi dan Sampel**

Populasi dan teknik sampling dari penelitian ini adalah pegawai yang terdapat pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan anggota populasi sebanyak 53 orang, Sampel yang ditentukan dengan teknik *accidental sampling* dalam penetuan sampling nya sebanyak 30 orang. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

* + 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Studi Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan yaitu kegiatan yang di lakukan untuk memperoleh data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan memahami teori-teori dan konsep dasar yang dikemukakan oleh para ahli dan referensi dari berbagai data yang bersumber dari buku-buku, artikel, dokumen dan laporan yang berupa jurnal atau hasil catatan penting lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

1. **Studi Lapangan**

Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung pada objek yang sedang diteliti dengan teknik-teknik sebagai berikut:

# Observasi non partisipan

Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti namun peneliti tidak terlibat langsung dalam proses kerja yang dilakukan pegawai di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

# Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung kepada responden, yaitu kepada pegawai di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

# Angket

Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Guna angket ini adalah untuk mendapatkan jawaban dan informasi sekitar masalah yang diteliti di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

# Teknik Analisis Data

1. **Uji Validitas**

Analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk pengolahan data adalah dengan menggunakan analisis ***Pearson Product Moment*** menurut **Sugiyono** dalam bukunya yang berjudul **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (2012:133)** untuk menguji validitas data, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

# Keterangan:

n = Banyak pasang data X dan Y

x = Total Jumlah dari variabel X

y = Total Jumlah dari variabel Y

x2 = Kuadrat dari total jumlah variabel X

y2 = Kuadrat dari total jumlah variabel Y

xy = Hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan Y

# Uji Reliabilitas

Uji realibilitas menunjukan pada pengertian bahwa suatu instrumen cukup dipercaya digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik, instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan pada responden untuk memilih jawaban tertentu.

Reliabilitas pada tingkat keterandalan sesuatu, reliabel artinya terpercaya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Data yang benar sesuai dengan kenyataannya, maka beberapa kalipun diambil tetap akan sama. Untuk mengukur atau menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian digunakan ***Metode Alpha Cronbach*** menurut **Arikunto** dalam bukunya **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (208:70)**, dengan rumus :

# Keterangan:

r = Koefisien

k = Jumlah butir pertanyaan (Soal)

σi2 = Varians butir-butir pertanyaan (Soal)

σ2 = Varians skor tes

Variansi butir itu sendiri dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

∑

σi2 =

Xi −

2

(∑ Xi)2 N

N

.

# Keterangan:

σi2 = Varian butir pertanyaan ke-n

∑ Xi = Jumlah skor jawaban subjek untuk butir pertanyaan ke-n Berdasarkan rumus diatas, seluruh variabel reliabel bila harga indek

reliabilitas yang diperoleh paling tidak mencapai 0,6 sedangkan untuk tes-tes standar atau yang distandarkan, harga indek reliabilitas paling tidak harus mencapai 0,85 atau bahkan 0,90.

# Uji Korelasi

Analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk pengolahan data adalah dengan menggunakan analisis korelasi ***Rank Sperman*** menurut **Sugiyono** dalam bukunya yang berjudul **Metode Penelitian Administrasi (2005:108)** untuk menguji data, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:



# Keterangan:

rs = Koefisien korelasi rank spearman

R(Xi) = Rank pada X untuk data ke-i

R(Yi) = Rank pada Y untuk data ke-i

n = Banyaknya sampel

# Istilah Analisis :

* 1. Signifikan yaitu data yang mempunyai makna, maksudnya dalam suatu item hasil perhitungan korelasi antar nilai item dengan totalnya menunjukkan koefisien korelasi yang signifikan, artinya hasil perhitungan mempunyai makna atau arti penting.
	2. Titik krisis digunakan untuk pengertian batasan antara signifikan dengan non signifikan data hasil analisis yang telah dihitung.
	3. Alpha a yaitu derajat kepercayaan a = 0,05 mempunyai arti bahwa tingkat kepercayaan adalah 95% dan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam analisis dapat diberikan toleransi hanya sampai 5% dan dalam ilmu sosial pada umumnya mempergunakan a = 0,05 .
	4. ρ = lambang dari korelasi, sebagai simbol untuk mengetahui eratnya hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).
	5. Setelah melakukan pengujian hipotesis dan jika hasilnya signifikan, maka untuk menentukan keeratan hubungan kedua variabel dapat digunakan kriteria **Guildford** yang dikutip oleh **Sugiyono** dalam bukunya **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (2005:108)** sebagai berikut :

**Tabel 3. 5**

**Interval Koefisien**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nomor** | **Interval Koefisien** | **Tingkat Hubungan** |
| 1 | ≥ 0,00 < 0,20 | Hubungan yang sangat kecil |
| 2 | ≥ 0,20 < 0,40 | Hubungan yang kecil (tidak erat) |
| 3 | ≥ 0,40 < 0,70 | Hubungan yang moderat/sedang |
| 4 | ≥ 0,70 < 0,90 | Hubungan yang erat |
| 5 | ≥ 0,90 < 1,00 | Hubungan yang sangat erat |

 Sumber : Sugiyono (2005:108) dalam buku Metode Penelitian

# Uji Regresi

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah ***Regresi Linier Sederhana*** menurut **Sitepu** dalam bukunya yang berjudul **Analisis Korelasi (1995:18)**, persamaan umum regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

Y = a + bx

Dimana a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus :

(Ʃyi)(Ʃxi2) − (Ʃxi)(Ʃxiyi)

a =

n Ʃxi2 − (Ʃxi)2

n Ʃxiyi − (Ʃxi)(Ʃyi)

b =

n Ʃxi2 − (Ʃxi)2

# Keterangan:

Y = Subjek dalam variabel dependen yang dipredisikan

a = Harga Y bila X=0 (harga konstanta)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik dan bila (-) maka terjadi penurunan.

x = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

* + 1. **Lokasi dan Jadwal Penelitian**
1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Garut No. 11, Kota Bandung, Jawa Barat. 022-7278809, 7206157 Fax. 022-7215894 Website : jabar.kpu.go.id

1. **Jadwal Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun Bulan****Minggu****Kegiatan** | **2019** |
| **Juli** | **Agustus** | **September** | **Oktober** | **November** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Tahap Persiapan** |  |  |
|  | Perizinan |  |  |  |  |  |
| Penjajagan |  |  |  |  |  |
| Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |
| Studi Pustaka |  |  |  |  |
| Perbaikan Proposal |  |  |  |  |
| **2.** | **Tahap Penelitian** |  |  |
|  | Observasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wawancara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyebaran Angket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penarikan Angket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Tahap****Penyusunan** |  |  |
|  | Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembuatan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Tahap Pengujian** |  |  |
|  | Revisi Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sidang UP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |